

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anggraini, Yett dan Martini. (2011). *Pelayanan Keluarga Berencana*. Yogyakarta: Rohima Press.
- Astuti, E.K. (2013). *Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis*. Semarang.
- Astuti. (2009). *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dahlan, S. (2003). *Hukum Kesehatan Rambu-rambu bagi Profesi Dokter*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadianto, T. (2000). *Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI)*.
- Handayani, S. (2010). *Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana*. Yogyakarta: Alenia Press.
- Hartanto, H. (2008). *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hasibuan. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Cumber Aksara.
- Indroharto. (2002). *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Irianto, K. (2014). *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Bandung: Alfabet.
- Kemenkes RI. (2018). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kesumnajaya. (2010). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Konsil Kedokteran Indonesia. (2006). *Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran*. Jakarta: Indonesia Medical Council.
- Lumenta. (2009). *Manajemen Hidup Sehat*. Jakarta: Gramedia.
- Manuaba, I.B.G. (2010). *Ilmu Kebidanan, penyakit Kandungan dan KB untuk Pendidikan Bidan*. Edisi 2. Jakarta: EGC.
- Marmi. (2014). *Etika Profesi Bidan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Noviawati dan Sujiyati. (2009). *Panduan Lengkap Pelayanan KB Terkini*. Jogjakarta: Nuha Medika.
- Nursalam. (2013). *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pedoman Skripsi, Tesis Dan Insrtumen Penelitian Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Prawirohardjo, S. (2010). *Obstetri dan Ginekologi Sosial*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Proverawati, A. (2009). *Panduan Memilih Kontrasepsi*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Ridwan HR. (2010). *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press
- Saifuddin. (2010). *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka.
- Sampurna, B., Syamsu, Z., dan Siswaja, T.D. (2005). *Bioetik dan Hukum Kedokteran ;Pengantar bagi mahasiswa kedokteran dan hukum*. Cetakan pertama. Jakarta: Pustaka Dwipar.
- Saryono. (2011). *Metodologi Penelitian Kesehatan Penuntun Praktis Bagi Pemula*. Yogyakarta: Mitra Cendekia Press.
- Siswati, S. (2003). *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sofyan. (2013). *Bidan Menyongsong Masa Depan*. Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia.
- Suratman dan Philips, D. (2012). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfa Beta.
- Wahyuningsih. (2010). *Buku Saku Kebidanan*. Jakarta: EGC.
- Wiknjosastro, H. (2009). *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.

## **B. Jurnal**

- Daroyah. (2012). Kejadian Efek Samping Pemakaian Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (Implant) di Desa Bigaran Kabupaten Magelang. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Aisyah Yogyakarta
- Gustikawati, D.A. (2014). *Faktor Pendukung dan Penghambat Istri PUS dalam Penggunaan Alat Kontrasepsi Implant di Puskesmas 1 Denpasar Utara*.

*Publikasi Penelitian*. Thesis. Denpasar: Jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Udaya. Diakses dari: <https://docplayer.info/138351-Faktor-pendukung-dan-penghambat-istri-pasangan-usia-subur-dalam-penggunaan-alat-kontrasepsi-implant-di-puskesmas-i-denpasar-utara.html>. Diakses tanggal 20 Maret 2020.

Philipus M. Hadjon. (1997). “Tentang Wewenang”, *Yuridika*, Volume No.5 dan 6, Tahun XII, September-Desember hal.1.

Population Reference Bureau (PRB). (2013). *World Population Data Sheet*. Diakses dari: [www.prb.org](http://www.prb.org). Diakses tanggal 21 Februari 2020.

Rozana, E. (2010). *Evaluasi Pelaksanaan Informed Consent pada Akseptor KB di RSU Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2010*. Thesis. Yogyakarta: Universitas Aisyiyah Yogyakarta. Diakses dari: <http://digilib.unisayogya.ac.id/1642/>. Diakses tanggal 4 April 2020.

Wardhani, I.A.S.K. (2014). *Implementasi Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) dalam Perjanjian Terapeutik oleh Tenaga Kesehatan terhadap Pasien Rumah Sakit di Provinsi Bali*. Jurnal Magister Hukum Udayana Vol 3(1). Diakses dari: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/8453>. Diakses tanggal 3 April 2020

### C. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

<https://persi.or.id/wp-content/uploads/2020/11/uu292004.pdf>

Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. [https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/UU\\_36\\_2009\\_Kesehatan.pdf](https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/UU_36_2009_Kesehatan.pdf)

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. <https://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/uu%20no%2052%20tahun%2009.pdf>

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan [https://gajiroum.kemkes.go.id/data/UU\\_NO\\_36\\_2014.pdf](https://gajiroum.kemkes.go.id/data/UU_NO_36_2014.pdf)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. <https://www.bphn.go.id/data/documents/14pp087.pdf>

Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Republik Indonesia Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

<https://www.persi.or.id/images/regulasi/kepmenkes/kmk9002002.pdf>.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang *Persetujuan Tindakan Kedokteran*.

<http://bksikmikpikkfki.net/file/download/PMK%20No.%20290%20Th%202008%20ttg%20Persetujuan%20Tindakan%20Kedokteran.pdf>.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 75 tahun 2014 tentang Puskesmas.

<http://www.depkes.go.id/resources/download/peraturan/PMK-No-75-Th-2014-ttg-Puskesmas.pdf>.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

<https://ngada.org/bn501-2010.html>.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Kebidanan.

<http://www.ibi.or.id/media/PMK%20No.%2028%20ttg%20Izin%20dan%20Penyelenggaraan%20Praktik%20Bidan.pdf>

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

<http://bksikmikpikkfki.net/file/download/PMK%20No.%20290%20Th%202008%20ttg%20Persetujuan%20Tindakan%20Kedokteran.pdf>.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang *Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi Serta Pelayanan Kesehatan Seksual*.

<https://kesga.kemkes.go.id/assets/file/pedoman/PMK%20No.%2097%20ttg%20Pelayanan%20Kesehatan%20Kehamilan.pdf>

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksaaan Praktik Kedokteran.

<https://ika-fkunpad.org/wp-content/uploads/2014/10/PMK-No.-512-ttg-Izin-Praktik-dan-Pelaksanaan-Praktik-Kedokteran.pdf>

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Kebidanan.

<http://www.ibi.or.id/media/PMK%20No.%2028%20ttg%20Izin%20dan%20Penyelenggaraan%20Praktik%20Bidan.pdf>

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang *Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana*.

<https://jdih.go.id/files/241/PERKA%2010%202018.pdf>

Surat Keputusan PB IDI No 319/PB/A4/88.

